

INDONESIA, DUNIA, — DAN — PERGESERAN TATANAN GLOBAL

PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI
DI ERA MULTIPOLAR



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

3 April 2026

INDONESIA, DUNIA, DAN PERGESERAN TATANAN GLOBAL

Abstrak Singkat

Makalah ini membahas bagaimana tatanan global sedang bergeser dari pola yang relatif liberal dan terpusat menuju susunan yang lebih multipolar, lebih terfragmentasi, dan lebih dipengaruhi oleh geoekonomi, teknologi, serta kompetisi atas sumber daya strategis. Pergeseran itu tampak dalam naiknya tarif dan pembatasan dagang, politisasi rantai pasok, melonjaknya arti strategis AI dan mineral kritis, serta tuntutan negara-negara berkembang untuk memperoleh representasi yang lebih besar dalam tata kelola global. WTO mencatat bahwa volume perdagangan barang dunia tumbuh 4,6% pada 2025 tetapi diproyeksikan melambat menjadi 1,9% pada 2026, sementara UNCTAD menilai ketidakpastian kebijakan pada 2025 berada pada level tertinggi abad ini. Pada saat yang sama, WTO juga mencatat bahwa porsi perdagangan dunia yang berjalan murni atas dasar most-favoured-nation telah turun menjadi 72%, sebuah sinyal bahwa aturan perdagangan global semakin dibentuk oleh kalkulasi strategis, bukan semata logika pasar. ([World Trade Organization](#))

Dalam konteks ini, Indonesia tidak lagi dapat memosisikan diri hanya sebagai penonton. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota penuh BRICS sejak Januari 2025, kandidat akses OECD pertama dari Asia Tenggara, dan penggerak utama ASEAN, Indonesia berada pada simpul penting antara Global South, ekonomi pasar global, dan proyek reformasi

kelembagaan internasional. Argumen utama makalah ini adalah bahwa Indonesia harus mengubah politik luar negeri bebas aktif dari sekadar doktrin normatif menjadi strategi negara yang operasional: memperkuat posisi dalam ASEAN, memperdalam integrasi dagang, mempercepat reformasi logistik dan SDM, mengelola hilirisasi secara berkelanjutan, dan membangun kapasitas teknologi agar tidak terjebak hanya sebagai pemasok bahan mentah atau pasar konsumsi. ([Kemlu](#))

Kata Kunci

Indonesia; tatanan global; multipolaritas; geoekonomi; Global South; ASEAN; BRICS; OECD; hilirisasi; perdagangan internasional.

Indonesia, Dunia, dan Pergeseran Tata Global

I. Pendahuluan

Dunia pada pertengahan dekade 2020-an tidak lagi dapat dijelaskan memadai dengan satu narasi tunggal seperti “globalisasi yang terus meluas” atau “tatanan liberal internasional yang stabil.” Yang sedang terjadi justru adalah pergeseran berlapis: perdagangan masih tumbuh, tetapi makin dipenuhi pagar strategis; investasi tetap bergerak, tetapi diarahkan oleh pertimbangan keamanan; teknologi mendorong produktivitas, tetapi juga memperdalam kompetisi antarnegara; dan lembaga-lembaga multilateral masih bertahan, tetapi otoritasnya semakin diperebutkan. WTO mencatat bahwa perdagangan barang dunia pada 2025 tumbuh lebih tinggi dari perkiraan karena permintaan terhadap barang-barang terkait AI, tetapi proyeksi 2026 tetap melambat dan dibayangi risiko konflik, harga energi, dan ketidakpastian kebijakan dagang. ([World Trade Organization](#))

UNCTAD bahkan menggambarkan situasi ini sebagai “reset” norma kebijakan perdagangan yang mengarah pada transformasi lebih dalam dari

ekonomi dunia. Menurut UNCTAD, dunia memasuki fase yang ditandai oleh ketidakpastian, tantangan geoekonomi, tekanan tarif, dan risiko stagflasi, dengan negara-negara berkembang menghadapi dampak yang asimetris. Dalam kerangka seperti itu, tatanan global bukan sedang runtuh secara total, melainkan sedang dinegosiasikan ulang. Inilah ruang tempat Indonesia harus membaca perubahan: bukan sebagai ancaman yang seluruhnya datang dari luar, tetapi sebagai perubahan struktur kesempatan yang menuntut respons strategis dari dalam.

Indonesia sendiri memasuki fase ini dengan modal yang tidak kecil. Bank Indonesia melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11% pada 2025, surplus perdagangan mencapai US\$49,82 miliar, dan cadangan devisa pada akhir Januari 2026 berada di US\$154,6 miliar. IMF pada konsultasi Pasal IV 2025 juga menyatakan bahwa pertumbuhan Indonesia tetap kuat di tengah guncangan eksternal, walaupun risiko dari shock kebijakan perdagangan, ketidakpastian berkepanjangan, dan volatilitas pasar keuangan global tetap besar. Dengan kata lain, Indonesia tidak memasuki era pergeseran global ini dari posisi lemah, tetapi juga belum dapat merasa aman. ([Bank Indonesia](#))

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan sekadar “apa yang berubah di dunia?”, melainkan “apa arti perubahan itu bagi strategi Indonesia?” Makalah ini berargumen bahwa Indonesia perlu membaca pergeseran tatanan global melalui empat lensa sekaligus: pergeseran kekuasaan dari unipolaritas ke multipolaritas berlapis; naiknya geoekonomi sebagai instrumen utama politik internasional; sentralitas teknologi dan mineral kritis dalam pembentukan kekuasaan; dan menguatnya tuntutan Global South untuk membentuk ulang tata kelola dunia. Setelah itu, pembahasan diarahkan pada bagaimana Indonesia dapat memperbesar daya tawarnya melalui diplomasi bebas aktif, penguatan ASEAN, diversifikasi ekonomi, dan reformasi struktural domestik. ([Kemlu](#))

II. Dari Dunia Unipolar ke Multipolaritas Berlapis

Salah satu ciri paling menonjol dari pergeseran global saat ini adalah mudahnya asumsi bahwa dunia bergerak di bawah satu arsitektur kekuasaan tunggal. Memang, tidak ada satu dokumen resmi yang dapat secara sederhana menyatakan “unipolaritas telah berakhir,” tetapi banyak indikator menunjukkan bahwa pusat-pusat pengaruh semakin menyebar. BRICS, misalnya, secara terbuka menuntut sistem internasional yang lebih representatif, lebih adil, lebih demokratis, dan lebih responsif terhadap realitas kontemporer, sembari menekankan perlunya partisipasi yang lebih berarti bagi emerging markets and developing countries dalam proses pengambilan keputusan global. Bahasa ini mencerminkan tuntutan politik yang lebih luas dari Global South terhadap struktur kekuasaan internasional.

Masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025 memperkuat pembacaan tersebut. Dalam FAQ resmi BRICS, Brazil sebagai rotating presidency menyatakan bahwa Indonesia secara formal menerima undangan pada 2024 dan keanggotaannya diumumkan resmi pada awal 2025. Artinya, Indonesia kini berada di salah satu forum yang secara eksplisit menempatkan reformasi tata kelola global, solidaritas Global South, dan penguatan kerja sama Selatan-Selatan sebagai agenda penting. Bergabungnya Indonesia tidak otomatis berarti berpindah blok, tetapi jelas menunjukkan bahwa Jakarta ingin hadir lebih aktif dalam arena di mana aturan-aturan global sedang diperdebatkan ulang. ([BRICS Brasil](#))

Menariknya, langkah ini berjalan bersamaan dengan jalur yang tampak berlawanan tetapi sesungguhnya saling melengkapi: proses akses OECD. OECD menegaskan bahwa Indonesia adalah negara pertama dari Asia Tenggara yang membuka pembahasan akses, dengan roadmap diadopsi pada 2024 dan dialog teknis mendalam memasuki fase baru pada 2025. OECD juga menyebut Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan demokrasi terbesar ketiga di dunia, serta menilai proses akses itu sebagai katalis reformasi menuju visi menjadi ekonomi maju pada 2045. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang memilih salah

satu kutub, melainkan sedang membangun posisi di beberapa arena sekaligus. ([OECD](#))

Dari sini tampak bahwa multipolaritas masa kini tidak berbentuk dunia yang terpecah rapi ke dalam dua blok besar. Yang muncul justru adalah multipolaritas berlapis: ada forum Global South seperti BRICS, ada tata kelola berbasis standar seperti OECD, ada arsitektur kawasan seperti ASEAN, dan ada forum ekonomi-politik global seperti G20. Indonesia berada di persilangan semuanya. Karena itu, kekuatan Indonesia pada era ini tidak akan diukur hanya dari kedekatannya dengan satu kekuatan besar, tetapi dari kemampuannya menjaga otonomi strategis sambil memaksimalkan manfaat dari berbagai lingkaran kerja sama tersebut. ([BRICS Brasil](#))

III. Geoekonomi sebagai Bahasa Baru Kekuasaan

Pergeseran kedua adalah naiknya geoekonomi sebagai bahasa utama hubungan internasional. Pada masa lalu, perdagangan internasional sering dipahami terutama sebagai arena efisiensi dan keuntungan bersama. Kini, perdagangan menjadi instrumen strategi negara. WTO mencatat bahwa pangsa perdagangan dunia yang berlangsung pada basis most-favoured-nation telah turun menjadi 72% setelah berfluktuasi sepanjang 2025. Penurunan itu penting karena menandakan makin banyak arus dagang yang berlangsung bukan di bawah aturan universal yang seragam, melainkan melalui jaringan perjanjian khusus, pembatasan strategis, dan penyesuaian kebijakan yang bersifat politis. ([World Trade Organization](#))

UNCTAD menambahkan bahwa prospek dunia kini dibayangi siklus konfrontasi geoekonomi, dengan tingkat ketidakpastian kebijakan pada musim semi 2025 berada pada titik tertinggi abad ini. Di banyak negara berkembang, tekanan itu terasa melalui volatilitas pasar keuangan, kekhawatiran atas tarif dan pembatasan teknologi, serta kenaikan biaya utang dan logistik. Dengan kata lain, dunia tidak sepenuhnya sedang “deglobalisasi”; yang terjadi lebih tepat dibaca sebagai globalisasi yang

semakin dipolitisasi. Arus barang, modal, dan teknologi tetap bergerak, tetapi semakin sering diarahkan oleh pertimbangan keamanan, daya tawar, dan kontrol strategis.

Dalam konteks Asia, IMF menunjukkan pola yang sama. Perdagangan intra-Asia terus menguat, dan sebagian ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat sebagai porsi total menurun, sementara pangsa ke Asia meningkat. IMF juga menilai bahwa perusahaan-perusahaan terus mengejar diversifikasi rantai pasok di Asia, termasuk di ASEAN, sebagai respons terhadap tekanan perdagangan dan fragmentasi. Hal ini berarti geoekonomi tidak selalu mematikan perdagangan; dalam banyak kasus ia justru memindahkan rute perdagangan, mengubah lokasi investasi, dan menyusun ulang peran kawasan-kawasan seperti Asia Tenggara. (IMF)

Bagi Indonesia, implikasinya sangat besar. Negara yang mampu menawarkan stabilitas, kedalaman pasar, logistik yang efisien, dan kepastian regulasi akan memperoleh manfaat dari re-konfigurasi rantai pasok. Namun negara yang lambat berbenah justru bisa tersingkir, meskipun memiliki sumber daya besar. Karena itu, geoekonomi menuntut lebih dari sekadar diplomasi eksternal; ia menuntut kompetisi institusional di dalam negeri. Dalam dunia seperti ini, bea masuk, perjanjian dagang, pelabuhan, kawasan industri, dan standar digital menjadi bagian dari strategi keamanan nasional dan daya saing nasional sekaligus. (IMF)

IV. Teknologi, AI, dan Mineral Kritis sebagai Fondasi Tata Baru

Pergeseran ketiga adalah bahwa teknologi bukan lagi sektor biasa, melainkan salah satu fondasi utama kekuasaan global. WTO menunjukkan bahwa perdagangan 2025 ditopang secara kuat oleh lonjakan permintaan terhadap barang-barang terkait AI, dan bahwa AI-related investment menjelaskan hampir separuh pertumbuhan perdagangan barang dunia pada 2025 serta porsi yang sangat besar dari investasi produktif di sejumlah kawasan. Ini berarti AI tidak hanya mengubah perusahaan atau

pasar tenaga kerja, tetapi juga membentuk arsitektur perdagangan dan investasi dunia. ([World Trade Organization](#))

Namun, AI tidak dapat dipisahkan dari materialitasnya: chip, pusat data, energi, kabel, dan mineral kritis. IEA mencatat bahwa pasar mineral kritis justru makin terkonsentrasi, bukan makin tersebar. Untuk tembaga, lithium, nikel, kobalt, grafit, dan rare earth elements, pangsa rata-rata tiga negara pemurni terbesar naik menjadi 86% pada 2024 dari sekitar 82% pada 2020. IEA juga menyebut bahwa hampir seluruh pertumbuhan pasokan terbaru datang dari pemasok tunggal utama: Indonesia untuk nikel, dan Tiongkok untuk banyak mineral lain. Ini menempatkan sumber daya dan kapasitas pemrosesan mineral sebagai bagian dari geopolitik kontemporer, bukan sekadar isu pertambangan. ([IEA](#))

Indonesia karenanya berada pada posisi strategis sekaligus rawan. IEA memproyeksikan bahwa Indonesia akan melihat pertumbuhan pasokan yang signifikan dalam pasar nikel dan kobalt hingga dekade mendatang. Sementara itu, Kementerian ESDM menegaskan bahwa hilirisasi memperkuat posisi strategis Indonesia di pasar global, dengan realisasi PNBK sektor minerba pada 2025 sekitar Rp135 triliun. Ini menunjukkan bahwa pergeseran global memberi Indonesia kesempatan untuk naik kelas dari pemasok komoditas mentah menjadi pemain yang lebih penting dalam rantai nilai transisi energi. Namun peluang itu hanya akan bertahan bila hilirisasi dibarengi penguatan tata kelola, keberlanjutan lingkungan, dan perluasan ke tahapan bernilai tambah lebih tinggi. ([IEA](#))

Dengan demikian, dunia baru tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki armada terbesar atau cadangan devisa terbesar, tetapi juga oleh siapa yang menguasai titik-titik sempit rantai pasok teknologi. Dalam konteks Indonesia, ini berarti nikel, baterai, pemrosesan mineral, energi, dan kapasitas industri tidak boleh lagi dilihat sebagai sektor-sektor yang terpisah. Mereka adalah bagian dari posisi strategis Indonesia dalam tatanan global yang baru. ([IEA](#))

V. Global South dan Krisis Representasi Tata Kelola Dunia

Pergeseran keempat adalah menguatnya tuntutan dari negara-negara berkembang terhadap reformasi tata kelola global. BRICS dalam deklarasi Rio de Janeiro 2025 menekankan perlunya sistem internasional yang lebih representatif, legitimate, democratic, dan accountable, serta mendorong partisipasi yang lebih berarti bagi negara-negara berkembang dalam struktur pengambilan keputusan dunia. Pesan itu penting karena memperlihatkan bahwa pergeseran tatanan global bukan hanya soal perebutan kekuasaan material, tetapi juga perebutan legitimasi kelembagaan.

Indonesia sejak lama memiliki posisi yang relatif konsisten dalam isu ini. Dokumen Renstra Kementerian Luar Negeri 2025–2029 menegaskan bahwa Indonesia memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menjawab tantangan global dan mendorong diplomasi ekonomi untuk memperjuangkan arsitektur perekonomian dunia yang lebih berkeadilan. Ini memperlihatkan kesinambungan yang menarik: di satu sisi Indonesia masuk BRICS, di sisi lain Indonesia tetap aktif dalam OECD dan ASEAN. Maka bebas aktif pada konteks sekarang tidak cukup dimaknai sebagai “tidak memihak,” melainkan sebagai upaya memperbesar ruang gerak Indonesia dalam membentuk agenda global yang lebih seimbang. ([Kemlu](#))

Bila dibaca secara lebih dalam, posisi Indonesia sebenarnya mencerminkan logika negara menengah yang tidak ingin terjebak dalam subordinasi pada satu pusat kekuasaan. Indonesia dapat berbicara tentang reformasi global governance di forum BRICS, sambil sekaligus mengejar penyesuaian standar kebijakan publik melalui proses OECD. Strategi ini berpotensi memberi Indonesia identitas ganda yang produktif: sebagai suara Global South dan sekaligus sebagai reformer domestik yang ingin naik kelas kelembagaan. Tantangannya, tentu, adalah memastikan bahwa politik luar negeri multi-arena ini didukung konsistensi kebijakan dalam negeri. ([BRICS](#) [Brasil](#))

VI. Indonesia sebagai Simpul Kawasan: ASEAN dan Lingkaran Regional

Dalam membaca pergeseran global, Indonesia tidak boleh mengabaikan dimensi kawasan. ASEAN 2045: Our Shared Future secara eksplisit menyatakan bahwa ASEAN ingin tetap menjadi kekuatan pendorong utama dalam membentuk arsitektur kawasan dan berkontribusi pada tatanan internasional berbasis aturan di tengah ketegangan dan rivalitas geopolitik. Pernyataan ini penting karena Asia Tenggara adalah salah satu ruang tempat kompetisi antara kekuatan besar paling terasa, baik dalam perdagangan, teknologi, keamanan maritim, maupun investasi. ([ASEAN](#))

Bagi Indonesia, ASEAN bukan sekadar forum lingkungan sekitar, melainkan salah satu pengganda daya tawar. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia mempunyai kepentingan langsung agar Asia Tenggara tidak berubah menjadi sekadar arena kompetisi pihak luar. Dalam kerangka itu, penguatan ASEAN bukan urusan simbolik, melainkan strategi untuk menambah bobot kolektif kawasan dalam menghadapi tekanan eksternal. ASEAN yang lebih terintegrasi, lebih digital, dan lebih terhubung juga akan memperbesar peluang Indonesia masuk lebih jauh ke jaringan produksi dan inovasi regional. ([ASEAN](#))

Namun, penguatan ASEAN tidak otomatis menjamin manfaat bagi Indonesia bila transformasi domestik berjalan lambat. Karena itu, posisi Indonesia di kawasan harus dibangun di atas dua kaki: kepemimpinan regional dan reformasi nasional. Tanpa yang kedua, yang pertama akan lebih banyak berhenti pada retorika. ([IMF](#))

VII. Posisi Indonesia Saat Ini: Resilien, tetapi Belum Optimal

Data terbaru memberi gambaran yang cukup jelas tentang posisi Indonesia. Dari sisi makro, Indonesia relatif tangguh. Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan 5,11% pada 2025, surplus perdagangan yang meningkat, dan cadangan devisa yang kuat. IMF juga menilai sektor keuangan Indonesia broadly resilient, dengan inflasi terkendali dan

pertumbuhan tetap solid walaupun dihantam shock eksternal. Ini memberi Indonesia bantalan penting untuk bergerak lebih percaya diri dalam menghadapi ketidakpastian dunia. ([Bank Indonesia](#))

Dari sisi investasi, sinyalnya juga positif. BKPM melaporkan bahwa realisasi investasi 2025 melampaui target, sementara investasi di bidang hilirisasi pada Januari–Desember 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3% secara tahunan. Sinyal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai dipersepsikan bukan sekadar pasar, tetapi juga lokasi strategis untuk proses nilai tambah. Dalam konteks tataan global yang makin mencari diversifikasi pasokan, capaian ini bernilai strategis. ([BKPM](#))

Tetapi gambaran ini tidak boleh dibaca terlalu optimistis. IMF dalam Selected Issues Paper 2026 justru menegaskan bahwa Indonesia belum benar-benar mampu menangkap keuntungan dari ongoing supply chain reconfigurations. Kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan masih terbatas, dan IMF melihat perlunya integrasi dagang yang lebih dalam, pengurangan non-tariff barriers, serta reformasi struktural agar Indonesia benar-benar dapat menjadi production base yang kuat di tengah pergeseran global. Dengan kata lain, Indonesia sudah menarik, tetapi belum maksimal dalam mengubah ketertarikan itu menjadi lompatan struktural. ([IMF](#))

Ini adalah inti masalah strategis Indonesia saat ini. Kekuatan makro memberi stabilitas. Investasi memberi momentum. Sumber daya memberi leverage. Tetapi tanpa reformasi yang menurunkan biaya logistik, memperbaiki kualitas SDM, mempermudah perdagangan, dan memperdalam integrasi industri, Indonesia berisiko berhenti di tengah jalan: cukup penting untuk diperhitungkan, tetapi belum cukup siap untuk memimpin. ([IMF](#))

VIII. Doktrin Bebas Aktif di Era Tataan Global yang Bergeser

Politik luar negeri bebas aktif kerap dipahami secara populer sebagai posisi “tidak ikut blok mana pun.” Pemahaman itu tidak salah, tetapi terlalu

sempit untuk menjelaskan kebutuhan Indonesia hari ini. Dalam konteks sekarang, bebas aktif seharusnya dibaca sebagai kemampuan menjaga otonomi keputusan sambil aktif membentuk lingkungan strategis yang lebih menguntungkan. Dokumen Renstra Kemlu 2025–2029 yang menekankan bebas aktif dan diplomasi ekonomi untuk arsitektur global yang lebih adil menunjukkan bahwa pemerintah sendiri melihat dimensi itu. ([Kemlu](#))

Bebas aktif di era sekarang berarti beberapa hal sekaligus. Pertama, Indonesia harus cukup terbuka untuk terlibat dalam forum-forum yang berbeda karakter, termasuk BRICS dan OECD. Kedua, Indonesia harus cukup tegas untuk mempertahankan kepentingannya pada isu perdagangan, komoditas, dan pembangunan industri. Ketiga, Indonesia harus cukup kredibel di dalam negeri agar pesan diplomatiknya tidak terdengar kosong. Jadi, bebas aktif bukan posisi pasif di antara kutub-kutub besar, melainkan strategi aktif untuk memperbesar bargaining power melalui multi-alignment yang terukur. ([BRICS Brasil](#))

Dalam pengertian ini, keberhasilan bebas aktif akan diukur bukan dari seberapa sering Indonesia mengucapkan istilah itu, melainkan dari seberapa jauh Indonesia dapat mengubah jaringan hubungannya menjadi keuntungan nyata: pasar yang lebih luas, transfer teknologi, investasi yang lebih berkualitas, posisi tawar yang lebih tinggi dalam rantai pasok, dan ruang gerak diplomatik yang lebih mandiri. ([IMF](#))

IX. Peluang Strategis Indonesia dalam Tata

Peluang pertama adalah diversifikasi perdagangan dan integrasi yang lebih dalam. IMF menilai bahwa pengurangan non-tariff barriers dan pendalaman perjanjian dagang dengan mitra utama dapat menghasilkan kenaikan PDB yang signifikan bagi Indonesia. Bahkan, IMF mencatat bahwa jika Indonesia menurunkan NTBs dan memperdalam integrasi, negara ini dapat menjadi lebih “open for business” di tengah rantai pasok global yang bergeser. IMF juga menyoroti bahwa penggunaan input antara yang lebih

intensif seperti median ASEAN dapat memperbesar gain dari integrasi dagang sekitar 40% dibanding simulasi dasar. Ini menunjukkan bahwa isu perdagangan Indonesia hari ini bukan hanya soal membuka pasar, tetapi soal masuk lebih dalam ke arsitektur produksi regional dan global. ([IMF](#))

Peluang kedua adalah hilirisasi yang lebih cerdas. Indonesia sudah memiliki posisi kuat pada nikel, dan IEA melihat pertumbuhan pasokan Indonesia akan tetap sangat signifikan. Akan tetapi, peluang besar bukan terletak pada mengekspor lebih banyak nikel semata, melainkan pada penguasaan tahapan lebih lanjut: refining, material baterai, manufaktur, dan integrasi dengan ekosistem kendaraan listrik dan teknologi energi. Jika Indonesia mampu menghubungkan mineral, energi, industri, dan teknologi, maka hilirisasi dapat menjadi jembatan dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis kapabilitas. ([IEA](#))

Peluang ketiga adalah ekonomi digital dan teknologi. WTO menunjukkan bahwa AI-related goods telah menjadi salah satu motor utama perdagangan dunia. Ini berarti masa depan daya saing tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga oleh kemampuan menghubungkan manufaktur dengan data, software, logistik pintar, pusat data, dan keterampilan digital. Indonesia tidak harus menjadi pembuat chip frontier untuk memperoleh manfaat; tetapi Indonesia harus membangun ekosistem digital yang cukup kuat agar industri domestiknya tidak hanya menjadi pengguna teknologi impor. ([World Trade Organization](#))

Peluang keempat adalah diplomasi multi-arena. Sedikit negara yang secara bersamaan dapat memperkuat posisinya di ASEAN, BRICS, dan OECD seperti Indonesia. Kombinasi ini dapat menjadi modal strategis luar biasa: Indonesia dapat berbicara tentang reformasi tata kelola global, sambil juga menata reformasi kebijakan domestik berdasarkan standar internasional; dapat mengartikulasikan kepentingan Global South, sambil tetap menarik investasi dan kemitraan dari ekonomi-ekonomi maju. Dalam bahasa

manajemen strategis, ini adalah posisi portfolio diplomacy yang bernilai tinggi, asalkan dikelola dengan konsistensi. ([BRICS Brasil](#))

X. Risiko Besar yang Harus Diantisipasi

Peluang besar hampir selalu datang dengan risiko yang sama besar. Risiko pertama ialah menjadi “negara transit strategis” tanpa transformasi substantif. IMF menegaskan bahwa Indonesia belum sepenuhnya menangkap keuntungan dari pergeseran rantai pasok. Artinya, arus investasi dapat masuk tanpa menciptakan pendalaman industri yang cukup, transfer teknologi yang nyata, atau peningkatan produktivitas yang merata. Jika hal itu terjadi, Indonesia hanya menjadi tempat singgah produksi, bukan pusat kapabilitas baru. ([IMF](#))

Risiko kedua ialah ketergantungan berlebihan pada komoditas dan investor tertentu. Posisi Indonesia di pasar nikel memang kuat, tetapi IEA juga menekankan bahwa konsentrasi pasokan dan pemurnian global tetap sangat tinggi. Bila Indonesia tidak memperluas mitra, memperbaiki tata kelola, dan menyiapkan strategi industri yang melampaui ore-to-processing, maka keunggulan hari ini dapat berubah menjadi kerentanan esok hari. Dalam geopolitik mineral, kekuatan yang tidak diinstitusionalisasikan dengan baik mudah berubah menjadi ketergantungan baru. ([IEA](#))

Risiko ketiga adalah keterlambatan reformasi domestik. IMF secara khusus menyoroti perlunya pengurangan NTBs, perbaikan logistik, dan investasi SDM. Jika hambatan-hambatan ini tidak dikurangi, maka Indonesia akan terus kalah cepat dibanding negara-negara pesaing yang sama-sama ingin menarik relokasi industri dan integrasi rantai pasok. Dalam dunia geoekonomi, kecepatan reformasi adalah salah satu bentuk kekuasaan. ([IMF](#))

Risiko keempat adalah ketidaksinkronan antara diplomasi luar negeri dan kebijakan ekonomi dalam negeri. Indonesia bisa saja aktif di BRICS, OECD,

dan ASEAN, tetapi bila pesan eksternalnya tidak diikuti konsistensi peraturan, efisiensi birokrasi, dan kepastian kebijakan di dalam negeri, maka reputasi strategis itu akan cepat kehilangan bobot. Di sinilah pentingnya melihat politik luar negeri bukan sebagai panggung terpisah, tetapi sebagai perpanjangan dari kapasitas negara secara keseluruhan.

([Kemlu](#))

XI. Agenda Strategis Indonesia 2025–2045

Agenda pertama adalah memperlakukan perdagangan sebagai strategi pembangunan, bukan sekadar statistik ekspor-impor. RPJMN 2025–2029 dinyatakan Bappenas sebagai tahap pertama implementasi RPJPN 2025–2045 yang berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks itu, reformasi perdagangan, logistik, bea-cukai, standardisasi, dan kualitas perjanjian dagang harus dipandang sebagai bagian dari desain menuju ekonomi maju, bukan agenda teknokratis semata. IMF menilai bahwa liberalisasi yang lebih ambisius dan reformasi struktural dapat membantu Indonesia menjadi lebih terbuka dan lebih siap menangkap pergeseran rantai pasok. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Agenda kedua adalah memperkuat kualitas hilirisasi. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada bertambahnya smelter atau naiknya nilai ekspor setengah jadi. Hilirisasi yang strategis harus terhubung dengan riset, pengembangan SDM, standardisasi hijau, energi yang andal, dan pengembangan manufaktur yang lebih kompleks. Dengan posisi Indonesia yang sangat penting dalam pasokan nikel dan kobalt, pemerintah perlu memastikan bahwa keuntungan geoekonomi jangka pendek tidak mengorbankan legitimasi lingkungan, stabilitas energi, dan diversifikasi mitra. ([IEA](#))

Agenda ketiga adalah membangun kapabilitas teknologi dan SDM. IMF menunjukkan bahwa investasi pada human capital dan logistics dapat menurunkan trade costs dan meningkatkan ekspor, dengan dampak yang besar bagi sektor barang maupun jasa modern. Dalam dunia yang digerakkan AI dan digitalisasi, Indonesia harus menautkan kebijakan

industri dengan kebijakan pendidikan, pelatihan vokasi, dan kemampuan inovasi. Jika tidak, Indonesia akan kuat pada mineral tetapi lemah pada know-how, kuat pada pasar tetapi lemah pada produktivitas. ([IMF](#))

Agenda keempat adalah memperkuat diplomasi kawasan dan global secara bersamaan. ASEAN 2045 menekankan pentingnya menjaga ASEAN sebagai penggerak utama arsitektur kawasan di tengah rivalitas. Indonesia harus menjadikan kepemimpinan di ASEAN sebagai basis pengaruh yang konkret, sambil memanfaatkan BRICS untuk isu reformasi global governance dan OECD untuk penguatan reformasi domestik berbasis standar. Strategi seperti ini akan memberi Indonesia identitas yang tidak sempit: regional anchor, global South interlocutor, dan reform-minded emerging power. ([ASEAN](#))

Agenda kelima adalah menjaga stabilitas makro sambil meningkatkan kualitas pertumbuhan. Data BI dan IMF menunjukkan Indonesia punya bantalan yang cukup baik. Namun kualitas pertumbuhan akan semakin penting: apakah pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan bernilai tambah tinggi, memperluas kelas menengah, meningkatkan kedalaman industri, dan memperkuat kapasitas fiskal? Dalam dunia yang lebih bergejolak, pertumbuhan yang hanya bergantung pada konsumsi dan boom komoditas akan lebih mudah goyah dibanding pertumbuhan yang berbasis produktivitas dan integrasi cerdas ke ekonomi dunia. ([Bank Indonesia](#))

XII. Penutup

Pergeseran tatanan global yang sedang berlangsung bukanlah sebuah episode sementara. Ia adalah perubahan struktural pada cara kekuasaan, perdagangan, teknologi, dan legitimasi internasional dibentuk. WTO memperlihatkan bagaimana perdagangan dunia masih tumbuh tetapi makin dipengaruhi AI, tarif, dan konflik. UNCTAD menunjukkan bahwa ketidakpastian dan konfrontasi geoekonomi telah menjadi ciri utama fase sekarang. BRICS mengartikulasikan tuntutan Global South atas tata kelola yang lebih representatif, sementara OECD membuka jalur reformasi

kelembagaan yang lebih dalam bagi negara-negara yang ingin naik kelas. Seluruh dinamika itu menandakan satu hal: dunia sedang bergerak dari satu pusat gravitasi menuju banyak pusat gravitasi yang saling bersaing dan saling bernegosiasi. ([World Trade Organization](#))

Bagi Indonesia, perubahan itu menghadirkan tanggung jawab strategis. Indonesia terlalu besar untuk sekadar mengikuti arus, tetapi belum cukup kuat untuk mengabaikan perubahan struktur global. Karena itu, jalan yang paling masuk akal bukan isolasi, bukan subordinasi, melainkan otonomi strategis yang dibangun di atas bebas aktif, reformasi ekonomi, penguatan kawasan, dan peningkatan kapabilitas nasional. Masuknya Indonesia ke BRICS, proses OECD, kepemimpinan di ASEAN, kekuatan pada mineral kritis, serta ketahanan makro yang relatif baik memberi fondasi penting. Tetapi fondasi bukan rumah. Rumah itu baru akan berdiri apabila Indonesia konsisten mengubah posisi strategis menjadi kapasitas nyata. ([BRICS Brasil](#))

Dengan demikian, jawaban atas judul makalah ini dapat dirumuskan secara tegas: Indonesia tidak boleh memandang pergeseran tatanan global hanya sebagai badai yang harus dihadapi, melainkan sebagai momentum sejarah yang harus diarahkan. Negara yang berhasil pada era ini bukan hanya negara yang kaya sumber daya atau besar penduduknya, tetapi negara yang mampu membaca perubahan lebih cepat, membangun institusi lebih kuat, dan mengubah keterhubungan global menjadi kekuatan nasional. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu negara itu, tetapi peluang tersebut hanya akan bermakna bila dibarengi keberanian reformasi dan kejernihan strategi. ([Kemlu](#))

Glosarium

Tatanan global

Susunan norma, institusi, distribusi kekuasaan, dan pola hubungan antarnegara yang membentuk kehidupan internasional.

Multipolaritas

Keadaan ketika pengaruh global tidak terkonsentrasi pada satu atau dua negara saja, melainkan tersebar pada beberapa pusat kekuatan.

Geoekonomi

Penggunaan instrumen ekonomi seperti perdagangan, investasi, tarif, teknologi, dan rantai pasok untuk tujuan strategis dan politik.

Global South

Kelompok luas negara-negara berkembang yang sering mendorong reformasi tata kelola global agar lebih adil dan lebih representatif.

Politik luar negeri bebas aktif

Prinsip diplomasi Indonesia untuk menjaga kemandirian keputusan nasional sambil tetap aktif membentuk lingkungan internasional yang damai dan adil.

Hilirisasi

Proses meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan dan pengembangan industri lanjutan di dalam negeri.

Non-tariff barriers (NTBs)

Hambatan perdagangan selain tarif, seperti pembatasan administratif, sertifikasi, inspeksi, dan aturan teknis.

Rantai pasok global

Jaringan lintas negara yang menghubungkan produksi, distribusi, input, logistik, dan pasar suatu barang atau jasa.

Mineral kritis

Mineral yang sangat penting bagi transisi energi dan teknologi modern, seperti nikel, kobalt, lithium, dan rare earth elements.

Otonomi strategis

Kemampuan negara menjaga kebebasan manuver dan keputusan di tengah tekanan dari kekuatan-kekuatan besar.

Referensi (APA 7)

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *ASEAN 2045: Our Shared Future*. ([ASEAN](#))

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *ASEAN Community Vision 2045: Resilient, innovative, dynamic and people-centred ASEAN*. ([ASEAN](#))

Bank Indonesia. (2026, March). *Republic of Indonesia presentation book*. ([Bank Indonesia](#))

BRICS. (2025, January 20). *Frequently asked questions about the BRICS*. ([BRICS Brasil](#))

BRICS. (2025, July 6). *Rio de Janeiro declaration: Strengthening Global South cooperation for more inclusive and sustainable governance*.

International Energy Agency. (2025). *Global critical minerals outlook 2025*. ([IEA](#))

International Monetary Fund. (2025, October). *Regional Economic Outlook: Asia and Pacific—Navigating trade headwinds and rebalancing growth*. ([IMF](#))

International Monetary Fund. (2026, January 21). *Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia*. ([IMF](#))

International Monetary Fund. (2026, December 16). *Golden Vision 2045: Reaping the gains from trade—Indonesia selected issues paper no. 2026/007*. ([IMF](#))

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026, February 12). *Dirjen Minerba: Hilirisasi perkuat posisi strategis Indonesia di pasar global*. ([Ditjen Minerba](#))

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). *Renstra KSPI 2025–2029*. ([Kemlu](#))

Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Ringkasan RPJMN 2025–2029*. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Ministry of Investment/Downstream Industry (BKPM). (2026, January 15). *Realisasi investasi 2025 lampau target, hilirisasi melompat 43,3 persen*. ([BKPM](#))

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024, May 2). *Ministers welcome roadmap for accession discussions with Indonesia*. ([OECD](#))

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025, June 3). *Indonesia reaches key milestones in OECD accession process*. ([OECD](#))

United Nations Conference on Trade and Development. (2025). *Trade and development foresights 2025: Under pressure—Uncertainty reshapes global economic prospects*.

United Nations Conference on Trade and Development. (2025). *Trade and Development Report 2025, Chapter 1*. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

World Trade Organization. (2026, March 10). *Global trade outlook and statistics*. ([World Trade Organization](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 4 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d07b8b-4a48-839b-9d0d-f2b8e34095b3>